



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pedoman untuk proses penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang penyusunannya dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Tanah Datar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Musyawarah ...

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
11. Badan Anggaran DPRD yang selanjutnya disebut Banggar adalah kelengkapan DPRD yang bertugas untuk menyusun APBD.

Pasal 2

- (1) Pedoman umum Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan pedoman dan kalender kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- (2) Pedoman umum penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun:
 - a. perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2020;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018; dan
 - c. perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

- (1) Pedoman Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. perencanaan dan penganggaran Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - b. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - c. perencanaan dan penganggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 19 Februari 2019
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 19 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR,

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG : PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
I.	Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya	Paling lambat Minggu ke-I bulan Februari 2019	Badan Keuangan Daerah (BKD)
II.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2020 dan Penyusunan Renja Perangkat Daerah			
1.	Persiapan Penyusunan RKPD TA 2020	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Minggu ke-III s/d minggu ke-IV bulan Desember 2018	Baperlit-bang & Perangkat Daerah terkait
2.	Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Awal RKPD Provinsi	Minggu ke- I s/d minggu ke-IV bulan Januari 2019	Baperlit-bang
3.	Konsultasi Publik tentang Rancangan Awal RKPD	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Awal RKPD Provinsi	Minggu ke-IV bulan Januari 2019	Baperlit-bang
4.	Penyampaian Surat Edaran Bupati tentang rancangan awal RKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2020	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Awal RKPD Provinsi	Minggu ke-II Februari 2019	Baperlit bang

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
5.	Musrenbang Nagari Tahun 2019	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, RPJM Nagari, Perda Nomor 5 Tahun 2010, Perbup Nomor 50 Tahun 2015	Minggu ke-III bulan Januari s/d Minggu ke-II Februari 2019	Dinas PMDPPKB
6.	Musrenbang Kecamatan Tahun 2019	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah, Rancangan RKPD, Hasil Musrenbang Nagari, Perda Nomor 5 Tahun 2010, Perbup Nomor 50 Tahun 2015	Minggu ke-IV bulan Februari s/d minggu ke-I bulan Maret 2019	Baperlitbang
7.	Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Minggu ke-III s/d minggu ke-IV bulan Februari 2019	Baperlitbang
8.	Forum Internal Perangkat Daerah Tahun 2019	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah, Rancangan Awal RKPD, Hasil Musrenbang Kecamatan	Minggu ke-I bulan Maret 2019	Perangkat Daerah

9. Forum.....

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
9.	Forum Perangkat Daerah Tahun 2019	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah, Rancangan Awal RKPD, Hasil Musrenbang Kecamatan, Perda Nomor 5 Tahun 2010, Perbup Nomor 50 Tahun 2015	Minggu ke-II bulan Maret 2019	Baperlitbang
10.	Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2020	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, Rancangan Awal RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah	Minggu ke-III dan ke-IV bulan Maret 2019	Baperlitbang
11.	Musrenbang Kabupaten Tahun 2019	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah, Rancangan RKPD, Hasil Musrenbang Kecamatan, Hasil Forum Perangkat Daerah, Perda Nomor 5 Tahun 2010, Perbup Nomor 50 Tahun 2015	Minggu ke-III bulan Maret 2019	Baperlitbang
12.	Perumusan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2020	RKP, RPJMN, RPJP Provinsi, Rancangan RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Tanah Datar 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2016-2021, Rancangan Renja Perangkat Daerah, Rancangan RKPD, Hasil Musrenbang Kabupaten	Minggu ke-IV bulan Maret 2019	Baperlitbang

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
13.	Penyampaian rancangan akhir RKPD kepada setda untuk dibahas oleh seluruh perangkat daerah	Permendagri 86 tahun 2017	Minggu ke-IV bulan Maret 2019	Baperlitbang
14.	Review APIP	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017	Minggu ke-IV bulan Maret 2019	Inspektorat
15.	Penyampaian Ranperbup tentang RKPD Tahun 2020 ke Gubernur untuk difasilitasi	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015	Minggu ke-I bulan April 2019	BAGIAN HUKUM SETDA
16.	Penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2020	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Minggu ke-IV bulan Mei 2019	Baperlitbang
17.	Penetapan Renja Perangkat Daerah	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Minggu ke-II bulan Juni 2019	Perangkat Daerah
18.	Penyusunan Rancangan Awal RKPD TA 2021	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Minggu ke-I s/d bulan Desember 2019	Baperlitbang
III.	Penyusunan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020			
1.	Penyusunan Rancangan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta peraturan terkait lainnya	Minggu ke-II bulan Juni 2019	Baperlitbang
2.	Penyampaian Rancangan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 oleh TAPD kepada Bupati	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018	Paling lambat Minggu I bulan Juli	Baperlitbang
3.	Review APIP	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017	Minggu ke-I bulan Juli 2019	Inspektorat
4.	Penyampaian Rancangan KU-PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 oleh Bupati kepada DPRD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018	Paling lambat Minggu II bulan Juli	Baperlitbang

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
5.	Pembahasan Rancangan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya serta peraturan terkait lainnya	Minggu ke-III s/d minggu ke-IV bulan Juli 2019	Baperlit-bang
6.	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018	Paling lambat minggu ke- I bulan Agustus	Baperlit-bang
IV.	Penyusunan RKA- Perangkat Daerah Tahun 2020			
1.	Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD dan penyampaian draft RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD oleh Perangkat Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2020	Paling lambat minggu ke-II bulan Agustus	BKD
2.	Penelitian dan Pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2020, Pedoman Penyusunan RKA-Perangkat Daerah	Paling lambat minggu ke-II bulan Agustus	BKD
V.	Penyusunan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2020 dan Ranperbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020			BKD
1.	Penyusunan Ranperda APBD TA 2020 dan Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2020	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Pedoman Penyusunan APBD TA 2020, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2020	Minggu ke-IV bulan Agustus 2019	BKD
2.	Penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020 oleh PPKD kepada Bupati	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya	Minggu ke-I bulan September 2019	BKD

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
3.	Penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020 dan Nota Keuangan oleh Bupati kepada DPRD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat Minggu ke-I bulan September 2019	BKD
4.	Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Pedoman Penyusunan APBD TA 2020, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2020	Minggu ke-II bulan Oktober s/d minggu ke-I bulan November 2019	BKD
5.	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda APBD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Hasil Pembahasan Ranperda APBD antara TAPD dan Banggar DPRD	Minggu ke-II bulan November 2019	BKD
6.	Evaluasi Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020 oleh Gubernur	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda APBD	Minggu ke-III bulan November s/d minggu ke-I bulan Desember 2019	BKD
7.	Penyempurnaan Ranperda APBD Tahun 2020 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Hasil Evaluasi Gubernur atas Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda APBD TA 2020	Minggu ke-II bulan Desember 2019	BKD
8.	Penetapan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi Perda APBD tahun Anggaran 2020 dan Penetapan Ranperbup Penjabaran APBD Tahun 2020 menjadi Perbup Penjabaran APBD Tahun 2020	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Pedoman Penyusunan APBD TA 2020, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2020	Paling lambat akhir Desember (31 Desember 2019)	BKD

VI. Penetapan....

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
VI.	Penetapan DPA-SKPD dan DPA-PPKD Tahun Anggaran 2020			
1.	Penyusunan DPA SKPD dan DPA-PPKD	Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan DPA- SKPD, DPA PPKD Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2020, Peraturan Daerah tentang APBD TA 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2020	Paling lambat minggu ke-I bulan Januari 2020	BKD
2.	Penelitian DPA-SKPD dan DPA PPKD oleh Tim Peneliti DPA-SKPD dan DPA-PPKD	DPA- SKPD, Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan DPA- SKPD, Nota Kesepakatan KU dan PPAS APBD TA 2020, Peraturan Daerah tentang APBD TA 2020	Minggu ke-II s/d minggu ke-III bulan Januari 2020	BKD
3.	Pengesahan DPA - SKPD	DPA- SKPD, DPA-PPKD KU PPAS APBD TA 2020, Perda APBD TA 2020 dan Perbup tentang APBD tahun 2020	Minggu ke-III bulan Januari 2020	BKD

Keterangan:

Kalender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan/atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan RAPBD 2020.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG : PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB
1.	Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama disertai dengan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya oleh PPKD kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah	Peraturan Daerah APBD TA 2018, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-II bulan Juli 2019	BKD
2.	Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama disertai dengan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya	Peraturan Daerah APBD TA 2018, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-III bulan Juli 2019	BKD
3.	Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama disertai dengan Prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Peraturan Daerah APBD TA 2018, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-IV bulan Juli 2019	BKD

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
4.	Rekonsiliasi Laporan Keuangan TA 2018 antara Perangkat Daerah dengan PPKD	Peraturan Daerah APBD TA 2018, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-I dan II bulan Januari 2019	BKD
5.	Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah TA 2018 kepada Bupati melalui PPKD	Peraturan Daerah tentang APBD TA 2016, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-I dan II bulan Februari 2019	BKD
6.	Review APIP	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017	Minggu ke-III bulan Februari 2019	Inspektorat
7.	Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2018 oleh Bupati kepada BPK	Peraturan Daerah APBD TA 2018, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat tanggal 31 Maret 2019	BKD

8. Pemeriksaan....

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
8.	Pemeriksaan oleh Tim BPK	Peraturan Daerah APBD TA 2018, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Minggu ke-IV bulan Januari s/d minggu ke-II bulan Mei 2019 <u>Pemeriksaan Pendahuluan</u> : Minggu ke-IV Januari s/d Minggu ke-I bulan Maret. <u>Pemeriksaan Terinci</u> : Minggu ke-I April s/d Minggu ke-II bulan Mei.	BKD
9.	Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2018 oleh BPK	Peraturan Daerah APBD TA 2018, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat Minggu ke-IV bulan Mei 2019	BKD
10.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 (Nota Pertanggung jawaban Keuangan TA 2018) oleh Bupati kepada DPRD	Peraturan Daerah APBD TA 2018, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat minggu ke-IV bulan Juni 2019	BKD
11.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 dengan DPRD	Peraturan Daerah APBD TA 2018, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat minggu ke-III dan ke-IV bulan Juli 2019	BKD

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
12.	Pendapat Akhir DPRD dan Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban, Pelaksanaan APBD TA 2018	Peraturan Daerah APBD TA 2018, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat Minggu ke-IV bulan Juli 2019	BKD
13.	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 oleh Gubernur	Peraturan Daerah APBD TA 2018, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat Minggu ke-II s/d minggu ke IV bulan Agustus 2019	BKD
14.	Penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018.	Peraturan Daerah APBD TA 2018, Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya	Paling lambat Minggu ke-I bulan September 2019	BKD

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP. 19671130 199202 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG : PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNGJAWAB
I.	Penyusunan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019			
1.	Penyusunan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	Minggu ke-III dan ke-IV bulan Juli 2019	Baperlitbang
2.	Penyampaian Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 oleh TAPD kepada Bupati	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	Paling lambat Minggu ke-I bulan Agustus 2019	Baperlitbang
3.	Penyampaian Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 oleh Bupati kepada DPRD	Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	Minggu ke-I bulan Agustus 2019	Baperlitbang

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
4.	Pembahasan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	Minggu ke-I bulan Agustus 2019	Baperlitbang
5.	Penetapan Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2019	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Hasil Pembahasan Rancangan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2019	Paling lambat Minggu ke-II bulan Agustus 2019	Baperlitbang
II.	Penyusunan RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019			
1.	Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD Perubahan APBD TA 2019	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2019	Paling lambat Minggu ke-III bulan Agustus 2019	BKD
2.	Penelitian dan Pembahasan RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD Perubahan APBD TA 2019	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2019, Surat Edaran Bupati perihal Pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah dan DPPA Perubahan APBD TA 2019	Minggu ke-III dan ke-IV bulan Agustus 2019	BKD
III.	Penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Ranperbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2019			
1.	Penyusunan Ranperda Perubahan APBD TA 2018 dan Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2018	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2019, Perubahan RKPD tahun 2019, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD TA 2019	Minggu ke-I bulan September 2019	BKD

2. Penyampaian ...

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
2.	Penyampaian Ranperda Perubahan APBD Tahun 2018 oleh PPKD kepada Bupati	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2019, Perubahan RKPD tahun 2019, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD TA 2019	Minggu ke-I bulan September 2019	BKD
3.	Penyampaian Ranperda Perubahan APBD Tahun 2018 oleh Bupati kepada DPRD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2019, Perubahan RKPD tahun 2019, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD TA 2019	Paling lambat minggu ke-II bulan September 2019	BKD
4.	Pembahasan Ranperda Perubahan APBD TA 2018 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2019, Perubahan RKPD tahun 2019, Pedoman Penyusunan Perubahan APBD TA 2019	Minggu ke-III dan ke-IV bulan September 2019	BKD
5.	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Hasil Pembahasan Ranperda Perubahan APBD TA 2019 antara TAPD dengan Banggar DPRD	Minggu ke-IV bulan September 2019	BKD
6.	Penyampaian Ranperda Perubahan APBD TA 2019 untuk dievaluasi oleh Gubernur	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD	Paling lambat minggu ke-IV bulan September 2019	BKD
7.	Penetapan hasil evaluasi Ranperda Perubahan APBD TA 2019 oleh Gubernur	Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD	Minggu ke-III bulan Oktober 2018	BKD
8.	Penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD TA 2019 sesuai hasil evaluasi Gubernur	Hasil evaluasi Gubernur atas Keputusan Bersama antara Bupati dan DPRD tentang Ranperda Perubahan APBD	Minggu ke-IV bulan Oktober 2019	BKD

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
9.	Penetapan Ranperda Perubahan APBD TA 2019 menjadi Perda Perubahan APBD TA 2019 dan Penetapan Ranperbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2019 menjadi Perbup Penjabaran Perubahan APBD TA 2019	Penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD TA 2019 sesuai hasil evaluasi Gubernur	Minggu ke-IV bulan Oktober 2019	BKD
IV.	Penetapan DPPA- SKPD Tahun 2019			
1.	Penyusunan DPPA-SKPD Tahun 2019	Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan DPPA-SKPD, Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2019, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019	Minggu ke-I bulan November 2019	BKD
2.	Penelitian DPPA - SKPD oleh Tim Peneliti DPPA Perangkat Daerah	Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan DPPA-SKPD, Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2019, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2019, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019	Minggu ke-I dan ke-II bulan November 2019	BKD

3. Pengesahan ...

NO	KEGIATAN	ACUAN	PERIODE PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
3.	Pengesahan DPPA-SKPD	Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan DPPA-SKPD, Nota Kesepakatan KU dan PPAS Perubahan APBD TA 2019, Perda Perubahan APBD TA 2019, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2019	Minggu ke-II bulan November 2019	BKD

Keterangan:

Kalender kegiatan ini akan mengalami penyesuaian dalam pelaksanaannya dengan mengikuti pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan atau belum diterbitkannya Pedoman Teknis oleh Pemerintah.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP. 19671130 199202 1 002